

Daftar Pustaka

A. Buku / Jurnal

- Albrow , M. 1996. *Birokrasi*. Tiara Wacana., Yogyakarta
- Blau, P. and Marshall, W.M. 1987. *Birokrasi dalam Masyarakat modern*. UI Press., Jakarta.
- Budi, S.P.1997. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Prerspektif Kultular dan Struktural*. PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Budiarjo, M. dan Ibrahim A. (ed.). 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada., Jakarta
- Cipto, B. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modren-Industrial*. PT Raja Grafindo., Jakarta.
- Dalail, N. 2001. *Menata Birokrasi Menuju Bentuk Yang Ideal, dalam Widya Praja*. Vol : XXVII Nomor 3. Lembaga Pengabdian Masyarakat IIP., Jakarta.
- Danim, S. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Darwanto, H. 1999. *Perencanaan Tata Ruang Wailayah Berbasiskan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan.*, Jakarta.
- Dunn, N.W. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada., Yogyakarta.
- Edwrad, C.G. III. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quartelly Press., Washington DC.
- Eko, S. 1996. *Birokrasai, Modernaisasi Dan Kapitalisme Orde Baru Dalam Prisma No 8 Tahun XXV*. 1996



- Etzioni, E. 1983. *Bureacracy and Democracy, a politicall dilemima*, Routledge & Kegan Paul.
- Grindle, M. (ed.). 1980. *Politics And Policy Implemenatation In The Third World*. Princenton University Press., London.
- Grindle, M. and John. W.T. 1991. *Public Choices And Policy Change*, The John Hopkin University Press.
- Hoessein, B. 2002. *Reposisi Peran DPRD*. Jurnal PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan). Edisi April-Juni., Jakarta.
- Hughes, O. 1994. *Public Management & Administration An Introduction*, ST. Martin's Press. WC., New York.
- Hussain, A.A.B. 2001. *Peranan Administarsi Pembangunan Dalam Mengimplementasikan Otonomi Daerah, Dalam Siasat*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Badan Penerbit Fisipol Universitas Islam Riau., Pekanbaru.
- Islamy, M.I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara., Jakarta.
- Jurnal Otonomi Daerah. 2003. *Peran DPRD: Bukan hal-hal teknis yang menjadi domain kerja birokrasi*., Jakarta.
- _____.2003. *Dukungan birokrasi daerah untuk penyehatan dan penguatan sistem politik demokratis di daerah*. Jakarta.
- _____.2003. *DPRD memiliki kekuatan adidaya atau kebal terhadap kontrol*. Jakarta.
- Jurnal Otonomi Daerah. 2002. *Birokrasi Di Daerah Harus Mampu Mengimbangi Dinamika Politik Tinggi*. Jakarta.
- _____. 2002. *Strategi Kemitraan Yang Sinergi Antara Eksekutif Dan Legislatif Daerah*. Jakarta.
- Kumortomo, W. 2001. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo., Jakarta.



- Mas'ood, M. 1989. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)., Jakarta.
- _____. 1997. *Politik, Birokrasi Dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Mazmanian, D. and Paul S. 1983. *Implementaion and Public Policy*, Foresman and Company
- Meltsner, A. 1986. *Policy Analysts In The Bureaucracy*., University of California.
- Mimbar Depdagri. 2001. *Hubungan Eksekutif-Legislatif : Diperlukan Konsensus Etis Dan Nilai Budaya Lokal*. Jakarta.
- Moekiyat, A.P. 2002. *Hubungan Kemitraan Eksekutif Dan Legislatif Daerah*. Dalam Jurnal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Muhaimin, Y. 1990. *Beberapa Segi Borokrasi Di Indonesia*. Dalam essei-essei Fisipol Bulak Sumur. Rahmadani., Solo.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Nusa, H. 2001. *Pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kajian Kritis Terhadap Optimalisasi Fungsi Dan Peran DPRD Berdasarkan UU 22/1999*, Dalam forum inovasi *capacity building & good governance* vol 1.
- Pekanbaru dalam angka. 2001. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru-badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- Pratikno. 1998. *Urgensi Reformasi Basis Kekuasaan Birokrasi Di Indonesia*. Dalam JKAP Volume 2 Nomor 1 Februari 1998.
- _____. 1997. *Birokrasi di Indonesia* dalam kumpulan tulisan orientasi pendalaman bidang tugas DPRD TK I dan II Depdagri.
- Riggs, F.W (ed.). 1989. *Adiministrasi Pembangunan Sistim Administrasi Dan Birokrasi*. Rajawali Press., Jakarta.



- Ripley, B.R. Tanpa Tahun *Policy implementation and bureaucracy*. The Dorsey Press Chicago. Illionis., United State.
- Rowa, H. 2001. *Fenomena Pergeseran Prilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Dalam Widya Praja Vol : XXVII Nomor 3. Lembaga Pengabdian Masyarakat IIP., Jakarta.
- Sarundajang, S.H. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan., Jakarta.
- Setiawan, A. 1998. *Prilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Kekuasaan Jawa*. Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Silalahi, O. 1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Liberty., Yogyakarta.
- Suparjono dan Afan G. 1997. *Kebijaksanaan :state of the dicipline, models, dan proses*. Module perkuliaan pada program studi Magister Ilmu Administrasi PPs Universitas 17 Agustus 1945., Surabaya.
- Sutherland, H. Tanpa Tahun. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Sinar Harapan.
- Suwarno, P.J. 1989. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu Dan Sekarang*, Penerbit Universitas Atma Jaya., Yogyakarta.
- Taylor, C.L. 1983. *Why Government Grow Measuring Public Sector Size*, Sage Publication Pvt. Ltd New Delhi., India.
- Thoha, M. 1990. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Press., Jakarta.
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada., Jakarta.
- _____. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. PT Media Widya Mandala., Yogyakarta.
- Tjokriwinoto, M. 2001. *Birokrasi Dalam Polemik*. Pustaka Pelajar., Yogyakarta.



- Tuner, M. and David H. 1997. *Governance, administration and development making the state work*. Macmillan Press Ltd., London.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. RajaGrafindo Persada.
- Wahab, S.A. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara., Jakarta.
- Wahab, S.A, 2002, *Pengantar analisis kebijaksanaan negara*. Rineka Cipta., Jakarta.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Penerbit Insan Cendekia., Surabaya.
- Wijayanto, G. 1997. *Dalam rencana tata ruang Kotamadya Pekanbaru*, jurnal industri & perkotaan No 2, tahun I/Juni-Agustus., Pekanbaru.
- Yin, R. 1997. *Studi Kasus (desain & Metode)*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Yudoyono, B. 1998. *Birokrasi Publik dan Politik di Indonesia* dalam jurnal triwulan pembangunan daerah. Media Informasi Dan Komunikasi Pembangunan Daerah., Jakarta.
- Zainal, S. 2002. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah., Jakarta.

B. Dokumen-Dokumen

- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000, Tentang mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001, Tentang pengusahaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001, Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru
- DPRD Kota Pekanbaru, 2002, kegiatan sidang DPRD Kota Pekanbaru, sekretariat Dewan Kota Pekanbaru



Laporan pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru tahun anggaran 2000, Pemerintah Kota Pekanbaru

Laporan pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru tahun anggaran 2001, Pemerintah Kota Pekanbaru

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002, kepada Presiden Republik Indonesia, Pekanbaru, Maret, 2003

Penyusunan *Feasibility* study pembangunan infra struktur Kota Pekanbaru, laporan antara, 21 Oktober 2002

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, 2001, penerbit citra umbra Bandung

Undang-Undang R.I No 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan UU. RI. No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, penerbit arkola, surabaya.

C. Media Massa

Riau Pos, Kamis 3 Januari 2002, DPRD dukung penataan ulang Kota

Riau Pos, Jumat 4 Januari 2002, tender parkir pejabat saling lempar

Riau Pos, 11 Januari 2002, ultimatum MPP, tindakan komisi IV sudah diluar kewenang

Riau Pos, 28 Januari 2002, tidak ada lagi IMB RUKO di sepanjang Jl Jenderal Sudirman

Riau Pos, Selasa 9 April 2002, Dinas Tata Kota Diminta Untuk Terus Konsisten

Riau Pos, Minggu 14 April 2002, Pekanbaru : Kota Pekan Banyak Ruko

Riau Pos, Kamis 30 Mei 2002, Hakim Minta Ruko Di Ahmad Yani Dirubuhkan



Riau Pos, Sabtu 1 Juni 2002, Dinas Perhubungan perketat pungutan parkir

Watan 2 Juni 2002, Pekanbaru tempoe doeloe

Riau Pos, Minggu 2 Juni 2002, jangan jadikan Pekanbaru Kota RUKO

Riau Pos, Minggu 2 Juni 2002, Bertuah atau Kota Ruko ?

Riau Pos, 3 Juni 2002, pungutan parkir kecewakan warga

Riau Pos, 12 Juni 2002, aneh Pekanbaru jadi Kota RUKO

Riau Pos, Rabu 13 Juni 2002, Ruko Perlu Menunjang Visi Kota

Riau Pos, 14 Juni 2002, Pekanbaru Bakal Jadi Kota Macet

Riau Pos, 16 Juni 2002, bisakan menjadi identitas Melayu

Riau Pos, 17 Juni 2002, 123 rumah diancam bongkar paksa

Riau Pos, 17 Juni 2002, Pemerintah Kota akan siapkan terminal khusus truk

Riau Pos, 20 Juni 2002, Anggota DPRD bangun rumah makan tanpa izin

Riau Pos, 20 Juni 2002, RUTRK Baru Belah Kota Jadi Lima Wilayah

Riau Pos, 22 Juni 2002, IMB tidak berlaku untuk bangunan pejabat

Riau Pos, Sabtu 1 Juli 2002, Dishub Perketat Pungutan Parkir

Riau Pos, 9 Juli 2002, Ancaman Bongka Bangunan Tak Ber-IMB Gertak Sambal

Riau Pos, Jum'at 12 Juli 2002. Hanya 50 % Bangunan Ber-IMB

Riau Pos, Rabu 17 Juli 2002, Zona Kota Terkesan Amburadul